

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia masih berorientasi pada guru. Aktivitas belajar yang berorientasi pada guru tidak merangsang siswa untuk aktif dalam aktivitas pembelajaran, tetapi dapat menghambat daya berpikir siswa dalam proses pembelajaran (Septiana & Heri, 2023). Keadaan faktual tersebut tidak sejalan dengan salah satu muatan Pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam permendikbudristek No 7 Tahun 2022 Tentang Standar isi pada jenjang Pendidikan menengah atas, yaitu perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovasi untuk memecahkan permasalahan kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Akibatnya proses pembelajaran tersebut tidak dapat menjadikan siswa berjiwa *civic intelligence* sehingga akan memicu berbagai permasalahan yang terjadi pada diri siswa. Dewasa ini, pelajar apatis terhadap permasalahan kewargaan yang ada di negara ini, seperti sikap yang menunjukkan ketidaktertarikan dan rasa ingin tahu yang kurang terhadap masalah kewargaan karena mereka menganggap masalah kewargaan adalah tanggungjawab pemerintah, itu artinya mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam dirinya. Beberapa diantara mereka juga tidak terlibat dalam perpolitikan, mereka belum menunjukkan rasa tanggung jawab selaku warga negara yang berkesadaran demokrasi dalam menanggapi kebijakan politik pemerintah, dan penyampaian argumen baik lisan ataupun tulisan (Paranita, 2022).

Dari aspek aplikasi demokrasi di Indonesia, pada pemilu 2024 ini terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Kompas.com, 2024). Selain itu, pada 26 Februari 2024, Bawaslu sudah menerima 1.271 laporan pelanggaran pemilu, baik yang sifatnya pidana, administratif, dan pelanggaran hukum lainnya. Namun, laporan tersebut disanggah oleh Bawaslu yang menyatakan belum menemukan adanya pelanggaran pemilu dengan karakteristik Terstruktur,

Sistematis, dan Masif (TSM) (BBC News Indonesia, 2024). Peristiwa tersebut membuktikan bahwa peraturan tidak bertindak tegas dan tidak efektif dalam menjerat pelaku pelanggaran dalam pemilu. Bahkan sampai sekarang banyak pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti.

Generasi muda juga cenderung mementingkan diri sendiri (individualisme) sehingga kegiatan seperti kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat sudah tidak dilakukan. Sikap individualisme ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi (Arif, 2015). Selain itu, generasi muda juga cenderung mengidolakan budaya Negara lain dibandingkan budayanya sendiri, seperti munculnya para penggemar k-pop di kalangan pemuda.

Pemuda juga tidak berpartisipasi dalam urusan publik yang dibuktikan dalam penelitian terdahulu bahwa pemuda di Desa Bina Jaya tidak terlibat dalam agenda kemasyarakatan yang diselenggarakan desa. Hal ini dikarenakan gaya hidup pemuda sudah tercemari dengan segala hal yang bersifat modernisasi sehingga membuat pemuda tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kegiatan yang diselenggarakan desa, seperti pada kegiatan memperingati hari kemerdekaan. Mereka tidak terlibat dalam kegiatan karena mereka menganggap kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya (Tueno & Fitriyanti, 2018). Semua permasalahan tersebut merupakan indikasi bahwa siswa atau kalangan pemuda belum memiliki *civic intelligence*.

Pada hakikatnya, Pendidikan di Indonesia didasarkan atas landasan yuridis agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Fungsi dan tujuan Pendidikan tertera secara konkrit dalam Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar hakikat, tujuan dan fungsi Pendidikan berjalan dengan sempurna, maka perlu diterapkan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37 ayat (1) dimana salah satu mata pelajaran yang harus diikuti siswa yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn ini dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme”. PKn adalah suatu media untuk mengembangkan kecerdasan kewargaan, partisipasi kewargaan serta tanggung jawab warga Negara selaku pemuda Indonesia yang dapat dicapai melalui suatu konsep keilmuan, instrumentasi dan implementasi Pendidikan yang komprehensif (Winataputra & Budimansyah, 2012). Pada saat ini, PKn mengutamakan pembentukan warga negara yang bukan hanya tau hak dan kewajiban saja. Tetapi lebih masif lagi, yaitu mencetak warga negara yang cerdas dan berjiwa kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*), tanggung jawab warga Negara, dan partisipasi warga Negara.

Civic intelligence adalah kapasitas kolektivitas, mulai dari kelompok informal kecil sampai kegiatan kemanusiaan (Schuler, 2014). *Civic intelligence* merupakan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan membentuk lingkungan masa depan yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Schuler, 2010). *Civic intelligence* juga merupakan kemampuan dalam berperan proaktif selaku warga negara dan warga masyarakat dalam kehidupan yang kompleks dengan berdasarkan identitas normatif bangsa (Masrukhi, 2018). *Civic intelligence* adalah kemampuan individu dalam mengakses informasi dan komunikasi agar turut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama (Schuler & Susan, 2001). *Civic intelligence* juga merupakan salah satu aspek kecerdasan kolektif dan menyalurkan gagasan modal sosial (Putnam, 2000). Seseorang yang mempunyai *civic intelligence* akan mampu menerapkan kemampuan dirinya, kepedulian dengan lingkungannya dan mampu dalam menyikapi semua permasalahan kewargaan (Salsabila, 2023).

Pada praktiknya, seorang individu yang mempunyai kecerdasan kewargaan memiliki karakteristik seperti seseorang yang paham akan hak dan kewajiban warga, bisa memposisikan keunggulannya dalam harmonisasi kemajuan bersama, menemukan titik temu atas segala perbedaan, dan bisa menjawab panggilan untuk berpartisipasi dalam urusan publik (Budimansyah et al, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *civic intelligence* adalah seseorang yang memiliki kapasitas kolektivitas yang mengutamakan kepentingan umum untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, *civic intelligence* ini perlu untuk diinternalisasikan pada diri siswa di setiap lingkungan Pendidikan formal.

Dalam memenuhi penguasaan kompetensi Pendidikan kewarganegaraan yang berawal dari pengetahuan atau kognitif, sikap/afektif dan keterampilan atau psikomotorik agar menciptakan aktivitas pembelajaran yang menarik, menyenangkan, efektif dan pembelajaran sepanjang hayat, maka diperlukan pengembangan beberapa model pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan bahan ajar modul digital untuk mendukung proses pembelajaran agar terciptanya proses pembelajaran yang menarik minat siswa (Tamami, 2020). Modul digital merupakan bahan ajar yang dikonstruksikan dengan memanfaatkan alat elektronik dan muatan modul digital terdiri atas multimedia yang menjadikan modul digital lebih menarik dan memudahkan siswa dalam belajar dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Ketersediaan modul digital yang diperuntukkan pada siswa sangat sesuai dengan ketentuan dari kurikulum merdeka karena aktivitas belajarnya menunjang keaktifan dan daya berpikir kritis siswa (Sirate & Ramadhana, 2017).

Modul digital juga berguna dalam menjawab segala permasalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Modul digital adalah perangkat pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa secara pribadi atau belajar sendiri yang merupakan *self instructional* (Winkel, 2009). Modul digital juga dapat digunakan pada pembelajaran berbasis kooperatif yang diselingi dengan bimbingan guru. Pembelajaran dengan menggunakan modul digital dapat melatih aspek keterampilan siswa, salah

satunya keterampilan berpikir kritis (Dewantara et al, 2021). Modul digital dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar (Hervi, 2021).

Modul digital sebagai media pengembangan kemampuan dalam bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya sehingga mendorong siswa belajar secara mandiri berdasarkan minat dan kemampuan yang dimilikinya (Sungkono et al., 2003). Fungsi dari pengembangan modul digital, yaitu agar guru tidak dominan dalam proses pembelajaran dan mengoptimalkan kemandirian belajar siswa (Rosdiana et al, 2017; Susilo et al, 2016). Dengan demikian, modul digital ini sangat relevan sebagai media dalam menumbuhkan *civic intelligence* karena dapat menjadikan siswa lebih mandiri dalam belajar, meningkatkan daya berpikir kritis siswa, dan mendorong siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungan.

Modul digital ini juga sesuai dengan perkembangan zaman yang mengutamakan Pendidikan berbasis IT (*Information Technology*). Generasi muda pada saat sekarang lebih cenderung tertarik dan menghabiskan waktunya dengan media digital, seperti *handphone*, *laptop*, *ipad* dibandingkan media konvensional seperti buku dan koran. Oleh karena itu, kondisi seperti ini bisa diberdayakan dan diarahkan ke hal-hal yang positif, salah satunya dengan membuat bahan ajar berbasis digital agar siswa lebih tertarik dan semangat dalam belajar PKn.

Berdasarkan hasil angket yang telah peneliti sebarakan kepada 27 orang siswa kelas X di SMA Laboratorium-Percontohan UPI, Peneliti menemukan beberapa permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi fakta, dimana sebanyak 2 siswa tidak pernah membaca buku/ bahan ajar PKn, 24 siswa jarang membaca buku tersebut, dan hanya 1 siswa yang sering membaca buku atau bahan ajar PKn. Sejumlah 23 siswa jarang mengerjakan latihan soal yang ada di buku/ bahan ajar, 1 siswa tidak pernah dan hanya 3 siswa yang sering mengerjakan latihan soal tersebut. Selain itu, 10 orang siswa mengatakan bahwa bahan ajar PKn tidak menarik, 10 siswa tidak termotivasi dalam membaca buku sebelum mengerjakan soal latihan, dan 15 orang siswa tidak termotivasi untuk belajar mandiri (tanpa pengajaran dari guru).

Empat belas siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari PKn. Hal ini dikarenakan bahasa yang ada di buku sulit untuk dipahami dan mereka mengalami kesulitan dalam menghafalkan pasal dari peraturan perundang-undangan.

Dari hasil kalkulasi angket, sebanyak 16 siswa tidak pernah belajar dengan menggunakan modul digital. Dominasi dari siswa tidak mengetahui bentuk modul digital sebagai bahan ajar. Namun, mereka tertarik untuk belajar PKn dengan menggunakan modul digital.

Civic intelligence siswa juga masih dikategorikan kurang. Hal ini dikarenakan partisipasi siswa dalam keterlibatan organisasi atau komunitas di lingkungan sekolah maupun masyarakat masih minim. Lima belas siswa jarang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila (5 sila) dalam kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 21 siswa tidak memahami hakikat dari musyawarah dan mufakat. Tiga belas siswa belum bisa mengidentifikasi perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Sikap siswa terhadap isu Negara juga masih tergolong minim, rasa ingin tau siswa terhadap perpolitikan di Indonesia juga masih tergolong kurang. Hal ini dibuktikan dengan wawasan siswa yang hanya mengetahui 1 pasangan capres dan cawapres saja. Sebanyak 22 orang apatis terhadap Pilpres tahun 2024 dengan alasan masih dibawah umur sehingga tidak bisa ikut campur. Terkait berbagai permasalahan yang ada pada siswa tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pengembangan bahan ajar yang mumpuni dalam menumbuhkan *civic intelligence* siswa.

Dari respon angket analisis kebutuhan yang diberikan kepada guru PKn yang berinisial AAH mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan siswa diantaranya terlambat masuk ke sekolah dan melanggar kedisiplinan dalam berpakaian seperti seragam yang digunakan siswa tidak sesuai dengan peraturan sekolah dan memakai sepatu selain warna hitam. Kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran PKn yaitu dalam mengasah kecakapan siswa dalam berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan model pembelajaran dalam bentuk modul digital agar dapat menumbuhkembangkan kemandirian siswa dalam aktivitas belajar, akses belajar

siswa menjadi lebih cepat, meningkatkan daya berpikir kritis, berani dalam menyampaikan pendapat sehingga dapat menumbuhkan *civic intelligence* siswa.

Dalam pembuatan modul digital, Penulis mengangkat materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan materi tersebut dilandaskan atas relevansi materi dengan tujuan pembuatan modul. Dimana, materi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat relevan dijadikan konten dalam pembuatan modul digital agar dapat menumbuhkan *civic intelligence* siswa. Sebagaimana yang dinyatakan guru PKn bahwasanya materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat cocok untuk dijadikan materi modul digital.

Urgensi dari penelitian ini, yaitu untuk menciptakan bahan ajar pembelajaran PKn yang menarik, melatih siswa untuk belajar mandiri, penguasaan materi baik sebelum ataupun sesudah materi dijelaskan oleh guru, dan dalam rangka penumbuhan *civic intelligence* siswa. Dengan penggunaan modul digital dalam proses pembelajaran ini, siswa dapat berpikir kritis dan mampu menemukan solusi terhadap permasalahan kewargaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara. Modul digital ini dapat dijadikan solusi terhadap bahan ajar yang masih disajikan terpisah-pisah, dimana modul digital memuat semua media pembelajaran, seperti gambar, video, infografis, dan kuis dalam satu platform.

Penelitian ini juga untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya. Belum ada penelitian pengembangan yang membuat dan mengembangkan produk berupa modul digital PKn pada materi negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA Kelas X. Penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan pengembangan e-modul untuk pembelajaran PKn sangat tepat untuk dilakukan karena produk e-modul PKn yang sudah divalidasi pada materi arti gambar pada lambang Negara Indonesia memperoleh tanggapan yang positif dari siswa kelas III Sekolah Dasar (Rusnaini, dkk, 2023). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pembuatan produk berupa bahan ajar digital dalam bentuk *handout* berbasis canva dengan berdasarkan pada model pembelajaran *Reading, Identifying, Construction, Solving, Reviewing, Extending* (RICOSRE) tentang materi makna sila-sila

Pancasila dan menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase B (Novitasari et al, 2023).

Media pembelajaran berbasis Flash berpengaruh signifikan pada hasil belajar PKn siswa kelas IVB SDI Al Madina (Rahmaibu, 2016). Produk modul berbasis *mobile* menjadi salah satu inovasi dalam ranah Pendidikan terutama berkaitan dengan media pembelajaran dan sudah divalidasi sehingga bisa digunakan siswa untuk belajar PPKn (Sholikhah et al, 2022). Penelitian menjelaskan bahwa kualitas e-modul Pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber belajar pada mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan layak untuk digunakan dan mahasiswa tertarik menggunakan e-modul tersebut dalam pembelajaran (Husnulwati et al, 2019). Proses pengembangan multimedia dalam mata pelajaran PKn dengan menggunakan aplikasi *lectora inspire* pada siswa kelas X SMA sudah memenuhi praktikalitas dan validitas sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran PKn (Cantika et al, 2023). Kemajuan modul terkomputerisasi menggunakan Flip PDF Professional sangat substansial, sangat rasional dan sangat baik untuk diaplikasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas IV SD Negeri (Putri & Reinita, 2023). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya hanya membuat dan mengembangkan *handout*, e-modul, modul berbasis *mobile*, pengembangan multimedia dengan menggunakan aplikasi *lectora inspire*, dan modul yang dibuat dari aplikasi Flip PDF Professional. Belum ada yang mengembangkan bahan ajar digital berbasis *website* yang direlevansikan dengan *civic intelligence* siswa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar di dalam diri siswa terpatri *civic intelligence* untuk mengurangi atau memberantas kasus-kasus yang diakibatkan kurangnya *civic intelligence* pada generasi muda pada umumnya dan siswa pada khususnya. Atas dasar itu, penulis tertarik dalam melakukan pengembangan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA Kelas X.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Atas dasar latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar digital yang dilakukan guru dalam pembelajaran PKn di SMA Laboratorium Percontohan UPI?
2. Bagaimana proses pembuatan dan pengembangan modul digital PKn yang valid dan praktis pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA Kelas X?
3. Bagaimana efek penggunaan modul digital PKn dalam pembelajaran elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap *civic intelligence* siswa SMA kelas X?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menghasilkan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA Kelas X yang valid dan praktis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengembangan bahan ajar digital yang dilakukan guru dalam pembelajaran PKn di SMA Laboratorium Percontohan UPI.
2. Menghasilkan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA Kelas X yang valid dari aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan serta praktis dari aspek kemudahan penggunaan, efisiensi aktivitas pembelajaran, dan manfaat.
3. Mengetahui efek penggunaan modul digital PKn dalam pembelajaran elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia *civic intelligence* siswa SMA kelas X.

1.4 Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, maka akan terbentuk modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini akan menimbulkan beberapa manfaat, seperti:

1) Manfaat dari segi teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah bagi peneliti lain dan pihak ilmunan bidang lain. Penelitian ini juga bisa dijadikan acuan dalam pengembangan bahan ajar yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dipedomani dalam melakukan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan kecerdasan kewargaan (*civic Intelligence*). Sehingga suatu keilmuan menjadi sempurna jika penelitian dilakukan secara kontinuitas, tentunya juga diselaraskan dengan kebutuhan zamannya atau objek pendidikannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA kelas X. Modul digital sebagai bahan ajar mandiri ini menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga dapat mendorong siswa untuk dapat mencari solusi yang tepat atas permasalahan kewargaan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan adanya *civic intelligence* yang sudah terpatri pada diri siswa ini merupakan salah satu langkah dalam memajukan peradaban bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

2) Manfaat dari segi kebijakan (membahas perkembangan kebijakan formal)

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan dasar atau pelengkap dari kebijakan Pendidikan di lingkungan formal. Modul digital sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh siswa yang dominan aktivitasnya ada di *gadget*. Sehingga dapat memudahkan jangkauan siswa dalam mengakses dan membaca modul digital.

Modul digital dilengkapi dengan penjelasan materi, gambar, video, kuis, dan fitur menarik lainnya sehingga dapat memfasilitasi siswa dalam memahami materi pelajaran. Untuk itu, dengan adanya penelitian ini,

diharapkan modul digital sebagai bahan ajar penunjang ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran PKn di SMA kelas X.

Penelitian ini juga bisa dijadikan inspirasi agar kemendikbudristek merancang dan menerbitkan bahan ajar berbasis digital di era *society 5.0* untuk siswa di setiap mata pelajarannya. Terkait ini Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Didik Suhardi menyampaikan bahwa komunitas guru bisa bekerja sama membuat materi bahan ajar digital (Kominfo.go.id, 2024).

Sebelum merealisasikan hal tersebut hendaknya kemendikbudristek dan dinas pendidikan di setiap daerah mengadakan pelatihan kepada guru dalam membuat bahan ajar berupa modul digital yang disesuaikan dengan materi di setiap mata pelajaran. Selain itu, kemendikbudristek atau dinas pendidikan dapat membuat tutorial dalam pembuatan bahan ajar berbasis digital. Sehingga guru dapat terfasilitasi dengan baik karena banyak ditemukan guru belum mampu menggunakan IT dengan baik dan belum mampu mengolah perangkat pembelajaran berbasis digital.

Selanjutnya, guru bersinergi dalam membuat modul digital tersebut baik dibuat secara pribadi atau berkolaborasi dengan guru MGMP lainnya. Kemudian, pemerintah hendaknya membuat regulasi baru terkait perlunya pembuatan modul digital oleh setiap guru yang direlevansikan dengan peningkatan berbagai kompetensi yang harus dicapai siswa di setiap mata pelajarannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Contohnya modul digital PKn pada materi Pendidikan kewarganegaraan dibuat, dikembangkan dan dijadikan bahan ajar dengan tujuan untuk penumbuhan *civic intelligence* siswa.

3) Manfaat dari segi praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang menjadi pegangan siswa. Sehingga dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran serta bermanfaat dalam pengembangan modul digital pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan kecerdasan kewarganegaraan. Modul digital ini juga mampu menumbuhkembangkan kemandirian siswa dalam aktivitas pembelajaran, memahami materi dan

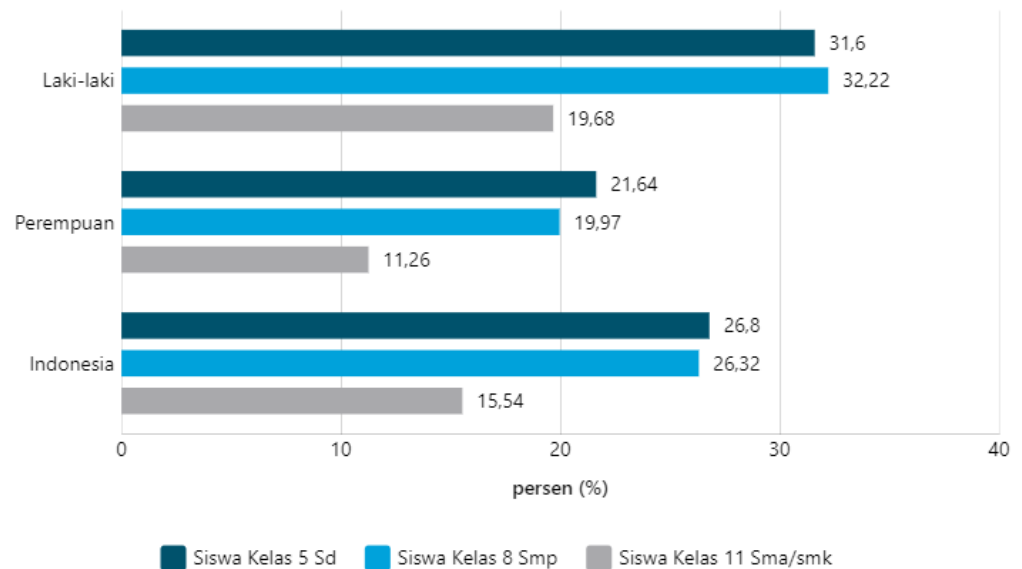
melatih daya berpikir kritis siswa. Selain itu, modul digital dapat dimanfaatkan guru sebagai bahan penunjang pembelajaran guna menumbuhkan *civic intelligence* siswa kelas X SMA. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan pembelajaran dengan menggunakan modul digital dapat melatih aspek keterampilan siswa, salah satunya keterampilan berpikir kritis (Dewantara, dkk, 2021). Modul digital adalah perangkat pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa secara pribadi atau belajar sendiri yang merupakan *self instructional* (Winkel, 2009). Perangkat pembelajaran dalam bentuk modul digital dapat merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dan merangsang *higher order thinking skills* (HOTS) atau berpikir kritis (Uswatun & Rohaeti, 2015). Modul digital juga dapat merangsang siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang maraknya berlangsung dewasa ini (Budiarti, dkk, 2016). Begitu juga dalam penelitian ini sudah dibuktikan bahwa modul digital dapat menumbuhkan *civic intelligence* siswa.

Modul digital ini sangat relevan dengan kurikulum merdeka karena pembelajaran dengan menggunakan modul digital ini dapat menunjang keaktifan siswa (*student centered learning*) dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kelas. Model pembelajaran modul digital ini juga sangat tepat digunakan dalam rangka realisasi pembelajaran berbasis IT yang sedang dideklarasikan kemendikbudristek akhir-akhir ini. Selain itu, pembelajaran berbasis IT ini dapat membuat siswa tertarik dalam belajar.

4) Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

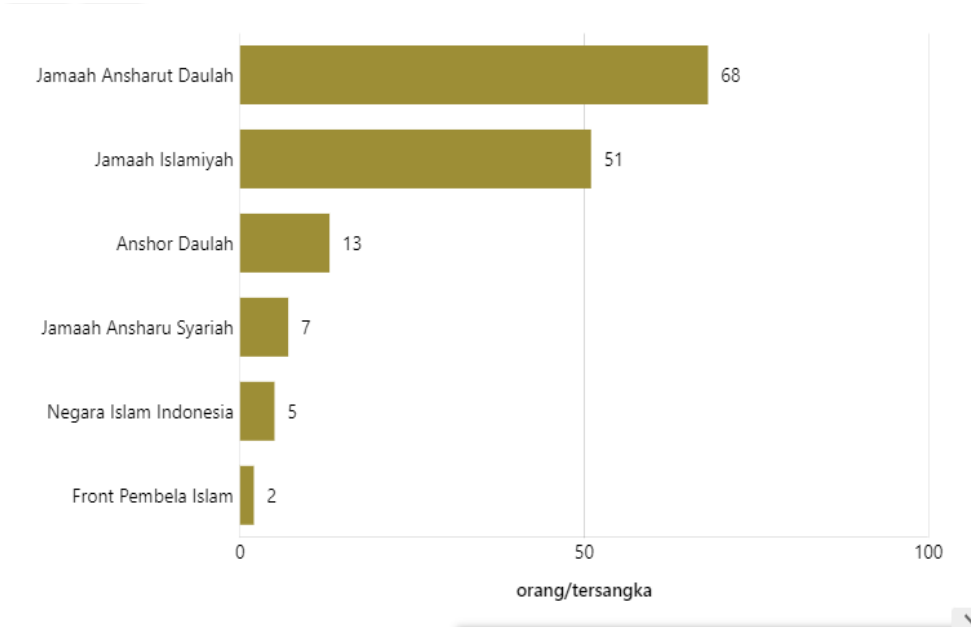
Hasil penelitian ini bisa diimplementasikan dalam dunia Pendidikan untuk mengkorelasikan materi pelajaran dengan isu-isu yang krusial berkaitan dengan Pendidikan kewarganegaraan. Sangat banyak isu yang bisa dikorelasikan dengan Pendidikan kewarganegaraan, seperti kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sikap egois dan individualis, kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia diantaranya: tindak pidana penganiayaan berat dan premanisme, membakar ruangan di Sekolah dengan

disengaja, tindak pencurian dengan kekerasan, begal, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian ternak, kasus prostitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), lahan dan hutan yang terbakar, Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kejahatan siber.



Gambar 1.1 Persentase Siswa yang Mengalami Perundungan/Bullying di Indonesia Tahun 2021

Dunia Pendidikan pada tahun 2021 ini mengalami darurat kekerasan, terbukti dengan banyaknya kasus *bullying*, perundungan, dan kekerasan lainnya di satuan Pendidikan di berbagai daerah. KPAI mencatat bahwasanya pada Januari-Agustus 2023 terdapat 810 kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah dan sosial. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase siswa laki-laki lebih dominan menjadi korban *bullying* dibandingkan perempuan. Salah satu kasus terjadi di Cilacap dengan korban inisial FF di Cilacap, Jawa Tengah yang ditendang dipukul oleh pelaku (satu sekolah dengan korban) (Databoks, 2023).



Gambar 1.2. Tersangka Teroris Tahun 2023

Sepanjang 2023 terdapat kasus teroris dengan jumlah tersangka sebanyak 146 orang. Semua tersangka sudah ditangkap oleh jajaran Densus 88 Antiteror Polri (Databoks, 2023).

Kasus-kasus tersebut juga bisa ditayangkan di video yang sudah disediakan pada modul digital. Dibawah video tersebut terdapat pertanyaan yang menanyakan solusi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam video, contohnya pada kasus *bullying*. Semua permasalahan atau kasus *bullying* bisa siswa telusuri penyebabnya satu persatu dan dibahas dari segi kewarganegaraan sehingga *civic intelligence* menjadi tumbuh pada diri siswa. Daya berpikir kritis siswa juga bisa diberdayakan dalam mencari solusi terhadap permasalahan *bullying* dan langkah apa yang harus siswa lakukan agar terhindar atau tidak melakukan tindakan *bullying*. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, dapat menjadikan siswa yang senantiasa bijak dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya dan menghargai sesamanya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan aksi sosial bagi siswa, terutama dalam keterlibatan siswa pada aktivitas kewarganegaraan. *Impact* dari penelitian ini bisa membuat siswa termotivasi dalam keterlibatannya di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara. Berbagai sikap positif

juga bermunculan setelah mempelajari modul digital ini sehingga harapannya siswa bisa menjadi pemuda yang aktif dimanapun ia berada.

Sebagaimana yang kita ketahui pemuda sangat berperan dalam kemajuan suatu bangsa dan bisa mengatasi berbagai persoalan ketika ilmu sudah ada digenggamannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemikiran para pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok yang mendesak golongan tua agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamlirkan tanpa menunggu instruksi dari Jepang. Sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia terealisasikan pada 17 Agustus 1945.

Selain itu, warga Negara Indonesia khususnya dikalangan pemuda juga turut serta dalam menjaga perdamaian dunia seperti yang dilakukan seorang hacker Indonesia (Salah satu dari *hacker* Top dunia yang bernama Tim Persaudaraan Hmei7) berhasil membajak Iron Dome Israel sehingga sistem pertahanan canggih itu menjadi malfungsi. Kejadian ini terjadi pada 5 November 2023 malam. Rudal yang seharusnya ditujukan ke Gaza justru berbalik arah menyerang kota Tel Aviv, Israel. Sikap Para hacker ini merupakan salah satu bukti sikap kepeduliannya sebagai masyarakat dunia terhadap Palestina yang digenosida oleh Israel. Tentunya perbuatan yang dilakukan Israel ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya dalam penumbuhan *civic intelligence* pada siswa.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang muncul yaitu pentingnya *civic intelligence* yang harus terpatri pada diri siswa yang diamanatkan pada pembelajaran PKn. Sedangkan pada kenyataannya siswa memiliki *civic intelligence* yang kurang. Sehingga timbulnya berbagai permasalahan akibat *civic intelligence* yang kurang ini. Masalah yang dirumuskan dalam tesis ini terdiri atas 3 rumusan masalah: 1) Bagaimana pengembangan bahan ajar digital yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PKn di SMA Laboratorium Percontohan UPI?; 2) Bagaimana proses pembuatan dan pengembangan modul digital PKn yang valid dan praktis pada materi

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA kelas X?; 3) Bagaimana efek penggunaan modul digital PKn dalam pembelajaran topik Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap *civic intelligence* siswa SMA kelas X?. Tesis ini terdiri atas 2 jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dalam penelitian ini untuk menghasilkan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap *civic intelligence* siswa dan terdiri atas 3 tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui pengembangan bahan ajar digital yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran PKn di SMA Laboratorium Percontohan UPI; menghasilkan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa SMA kelas X yang valid dari aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan serta praktis dari aspek kemudahan penggunaan, efisiensi aktivitas pembelajaran dan manfaat; serta mengetahui efek penggunaan modul digital PKn dalam pembelajaran topik Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap perubahan sikap *civic intelligence* siswa SMA kelas X. Manfaat/ signifikansi penelitian berisikan deskripsi kontribusi atau nilai lebih dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ditinjau dari 4 aspek, yaitu manfaat dari segi teori, manfaat dari segi kebijakan, manfaat dari segi praktik, serta manfaat dari segi isu dan aksi sosial. Bagian terakhir dari Bab I Pendahuluan yaitu struktur organisasi tesis yang mendeskripsikan susunan, gambaran umum muatan dari setiap bab, dan kaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Spesifikasi produk memaparkan gambaran produk yang dikembangkan oleh peneliti.

Jika Bab I Pendahuluan memuat gambaran teori secara sekilas, maka di Bab II ini mendeskripsikan satu per satu teori secara rinci. Bab II Kajian Pustaka terdiri atas teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian, yaitu teori *civic intelligence*, bahan Ajar, modul digital, model pembelajaran modul, validitas dan praktikalitas, pembelajaran dengan menggunakan modul digital untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa, materi Negara Kesatuan Republik Indonesia, model pengembangan perangkat pembelajaran, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual.

Bab III metode penelitian ini memuat prosedural penelitian. Bagian ini terdiri atas desain penelitian, partisipan, waktu dan tempat penelitian, data penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

Bab IV temuan dan pembahasan ini terdiri atas 3 subbab, diantaranya: profil lokasi penelitian yang meliputi deskripsi SMA Laboratorium Percontohan UPI, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana, serta ekstrakurikuler. Deskripsi data hasil penelitian memuat bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran PKn, pengembangan modul digital PKn untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa, efek penggunaan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa. Pembahasan terdiri atas bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran PKn, validitas modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa, praktikalitas modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa, dan efek penggunaan modul digital PKn pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menumbuhkan *civic intelligence* siswa.

Bab V simpulan, implikasi, dan rekomendasi ini terdiri atas simpulan; implikasi yang didalamnya memuat implikasi secara teoritis dan praktis; rekomendasi yang ditujukan pada pengambil kebijakan, sekolah, guru, siswa, dan peneliti selanjutnya.

Pada bagian selanjutnya yaitu daftar pustaka yang memuat semua rujukan atau referensi baik dari buku, artikel jurnal, seminar nasional/ internasional, tesis, dan *website*. Bagian berikutnya yakni lampiran. Lampiran ini memuat semua proses penelitian yang peneliti lakukan dan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Di dalam lampiran juga menjabarkan hasil dan analisis dari penelitian ini. Jumlah keseluruhan lampiran sebanyak 34 lampiran.

Bagian terakhir yaitu dokumentasi. Di dalam dokumentasi ini dicantumkan foto-foto atau gambar sebagai bukti bahwasanya peneliti melakukan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan di tempat berlangsungnya penelitian.